PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : **EKSEKUTIF**

LEMBAGA : **PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**

UNIT KERJA : **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **HARYONO WAHYUDI**
2. Jabatan : **KEPALA BADAN**
3. NHK : **500231**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN — Rp. 1.415.800.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 103 m2/84 m2 di KAB / KOTA KEBUMEN, HASIL SENDIRI Rp. 136.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/36 m2 di KAB / KOTA KEBUMEN, HASIL SENDIRI Rp. 136.800.000
3. Tanah Seluas 72 m2 di KAB / KOTA KEBUMEN, HASIL SENDIRI Rp. 102.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 112 m2/60 m2 di KAB / KOTA KEBUMEN, HASIL SENDIRI Rp. 232.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 151 m2/60 m2 di KAB / KOTA KEBUMEN, HASIL SENDIRI Rp. 336.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/36 m2 di KAB / KOTA KEBUMEN, HASIL SENDIRI Rp. 137.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 121 m2/72 m2 di KAB / KOTA KOTA YOGYAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 336.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN — Rp. 134.425.000

1. MOBIL, TOYOTA AVANZA 1.3 Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 101.175.000
2. MOTOR, HONDA SUPRA FIT NF100 Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 3.250.000
3. MOTOR, HONDA E1FO2N12M2 AT Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 9.750.000

4. MOTOR, HONDA F1C02N28LO Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 9.500.000
5. MOTOR, HONDA A1F02N37M1A/T Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 10.750.000

C.	**HARTA BERGERAK LAINNYA**	**Rp.**	**53.274.000**
D.	**SURAT BERHARGA**	**Rp.**	**----**
E.	**KAS DAN SETARA KAS**	**Rp.**	**27.385.859**
F.	**HARTA LAINNYA**	**Rp.**	**----**
	Sub Total	**Rp.**	**1.630.884.859**
III. HUTANG		**Rp.**	**----**
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)		**Rp.**	**1.630.884.859**

Catatan:
1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.